

Octaviani. C.C, Prathama. A (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Digital Dalam Meningkatkan Adaptasi Teknologi di SMK Assalam Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. *Prediksi Vol. 22(3). 234-242*

Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Digital Dalam Meningkatkan Adaptasi Teknologi Di SMK Assalam Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

Cindy Charissa Octaviani^{1*}, Ananta Prathama²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: ¹cindychrsa@gmail.com, ²prathama.ananta@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

12 Oktober 2023

Received in revised form:

18 Oktober 2023

Accepted:

25 Oktober 2023

Keyword:

Policy Implementation,
Digital Literacy, Public Policy

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Literasi Digital, Kebijakan
Publik.

ABSTRACT

The government through Minister of Education and Culture Regulation No. 23/2015 on Cultivating Budi Pekerti has established a School Literacy Movement (GLS) policy that includes digital literacy skills. This effort was made by the government to produce a young generation that is technologically proficient with the digital literacy movement in the school environment. In this research, the author wants to know the implementation of the digital literacy movement policy at SMK Assalam in Bantur sub-district. This research uses a qualitative descriptive method by analyzing and summarizing various data obtained through observations and interviews with factual conditions in the field. The results of the study show that the implementation of the digital literacy movement at SMK Assalam has been good so far. The success in its implementation is influenced by good communication between implementers and the openness of implementers in receiving new information. In addition, the school also has adequate infrastructure to support the success of digital literacy. Uneven internet access causes low awareness of students and guardians about the importance of technological skills in the world of education.

ABSTRAK

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti telah membentuk kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang mencakup keterampilan literasi digital. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk menghasilkan generasi muda yang cakap teknologi dengan gerakan literasi digital di lingkungan sekolah. Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui implementasi kebijakan gerakan literasi digital di SMK Assalam Kecamatan Bantur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis dan merangkum berbagai data yang diperoleh melalui hasil pengamatan maupun wawancara dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi gerakan literasi digital di SMK Assalam sejauh ini sudah bagus. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antar pelaksana serta keterbukaan pelaksana dalam menerima informasi baru. Selain itu, juga sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan literasi digital. Akses internet yang belum merata menyebabkan rendahnya kesadaran peserta didik dan wali murid mengenai pentingnya kecakapan teknologi dalam dunia pendidikan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: cindychrsa@gmail.com

PENDAHULUAN

Dunia saat ini bergerak menuju era society 5.0 yang umumnya mengarah pada kemajuan teknologi kearah otomatisasi dan digitalisasi dalam berbagai sektor. Secara tidak langsung posisi sumber daya manusia akan tergantikan oleh teknologi, hal ini akan menjadi ancaman nyata bagi generasi yang tidak cakap teknologi. Perubahan ke arah digital ini disebut "*the world is flat*" yang mengacu pada kenyataan bahwa perkembangan teknologi menyebabkan dunia tidak lagi dibatasi oleh batas negara dan zona waktu (Afandi dkk.,2016; Friedman, 2007). Hilangnya batas ini memudahkan akses terhadap informasi lebih mudah dan tidak terbatas.

Kemajuan zaman menjadikan teknologi dirancang untuk meningkatkan produktivitas. Dengan mengadopsi digitalisasi pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, hemat waktu dan sumber daya. Diperlukan kemampuan adaptasi agar seseorang terbiasa dengan teknologi dan tuntutan baru yang muncul. Adaptasi teknologi memungkinkan individu untuk mengatasi tantangan dan perubahan tersebut, sehingga tidak akan mengalami ketertinggalan terhadap kemajuan zaman. Selain itu, juga untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan baru dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya penting untuk kesuksesan individu, tetapi juga dapat berperan dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Dengan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi, memudahkan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini.

Literasi digital merupakan keterampilan kunci di abad ke-21 dan sangat penting untuk berhasil berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Literasi digital adalah kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam dunia yang semakin terhubung dan didorong oleh teknologi digital. Ini mencakup pemahaman terhadap informasi digital, keterampilan komunikasi online, kemampuan untuk mengevaluasi keaslian dan relevansi informasi di internet, serta kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi untuk keperluan pribadi, akademis, dan profesional. Literasi digital juga melibatkan kesadaran akan etika *online*, keamanan digital, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam lingkungan digital. Keseluruhan, literasi digital menjadi kunci untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang semakin tergantung pada teknologi informasi.

Perubahan kebijakan pendidikan mengarah pada kecakapan era digital yang berkaitan dengan enam macam literasi dasar, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan dasar untuk meningkatkan budaya literasi dapat melalui penyediaan bahan bacaan dan dorongan membaca (Kemendikbud, 2017). Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti telah membentuk kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Dalam kebijakan ini tertuang beberapa komponen literasi dasar, salah satunya adalah literasi digital yang mana secara umum memiliki pengertian sebagai kemampuan untuk mengakses teknologi dan informasi dari perangkat digital untuk membantu pekerjaan apa pun menjadi lebih efektif dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan (Gilster, 1997). Implementasi Gerakan Literasi Digital di lingkungan sekolah dianggap sebagai langkah krusial untuk mengenalkan literasi digital kepada generasi muda sejak dini. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan, memahami, dan turut berpartisipasi dalam teknologi digital secara efektif dalam beberapa aspek seperti keterampilan teknologi, literasi informasi, literasi media, dan literasi budaya digital.

Mengkaji implementasi kebijakan gerakan literasi digital di sekolah menjadi topik yang cukup menarik untuk mengetahui sejauh mana kebijakan diterapkan dalam mencapai tujuannya.

Implementasi gerakan literasi digital ini tentu berbeda dalam setiap sekolah, sebab pasti terdapat faktor yang menghambat dan mendukung penerapannya. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini terlaksana, ditemukan beberapa studi yang telah dilakukan peneliti sebelumnya sebagai berikut. Penelitian Annisa Setyaningrum (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan gerakan literasi digital di SMP Negeri 1 Mungkid telah berhasil dan efektif, namun terdapat beberapa faktor penghambat yaitu sekolah belum mengelola kebijakan tentang pembatasan penggunaan internet dengan jelas, adanya miskomunikasi antar guru dan tim literasi, motivasi siswa yang cenderung rendah, kurangnya dukungan dan kontrol dari orang tua, serta keterbatasan kuota dan gangguan jaringan.

Kemudian terdapat penelitian Putri & Ningsih (2020) menunjukkan bahwa gerakan literasi digital di Sekolah Muhammadiyah Pangkalan Bun sudah terimplementasikan dengan baik melalui media laptop, proyektor, *speaker*, dan wifi, namun belum dioptimalkan secara sempurna. Dalam pelaksanaannya, tidak semua jurusan menggunakan media digital melainkan hanya jurusan multimedia dan mata pelajaran multimedia saja. Kemudian penelitian oleh Alvisa & Nabila (2023) menunjukkan bahwa implementasi gerakan literasi digital di SMPN 3 Colomadu sudah telaksana melalui pembelajaran di sekolah dan direalisasikan melalui pelatihan video *content creator with smartphone*, menyelenggarakan *talk show*, lomba pembuatan video dan film pendek tingkat sekolah. Dalam pelaksanaannya ditemui tantangan seperti minimnya peralatan teknologi keterbatasan tenaga pengajar yang terampil, serta kurangnya dukungan dari orang tua.

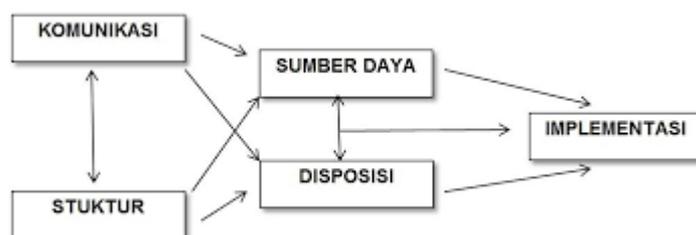
Salah satu sekolah unggul yang menerapkan literasi digital di lingkungan sekolah adalah SMK Assalam. Perkembangan media teknologi di SMK Assalam lebih unggul dibandingkan dengan sekolah lain di Desa Rejoyoso, hal ini ditunjukkan dengan keberhasilannya memperoleh anugerah SMK Pusat Keunggulan sebab sarana dan prasarana yang menunjang di SMK Assalam. Selain itu dalam meningkatkan adaptasi teknologi di lingkungan sekolah juga dilakukan kolaborasi dengan mitra yang bergerak dalam bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi gerakan literasi digital di SMK Assalam Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada kajian implementasi kebijakan gerakan literasi digital berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik mengarah ke suatu putusan atau tindakan yang diambil pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat. Sedangkan implementasi merupakan cara suatu kebijakan mencapai tujuannya. Van Meter dan Van Horn (1975) mengartikan implementasi kebijakan sebagai sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau sektor swasta, baik secara individu ataupun kolektif agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara singkat, implementasi kebijakan adalah proses untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan juga mencerminkan langkah yang diambil pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan dan dapat berjalan secara berkelanjutan serta diimplementasikan dengan baik.

Gambar 1. Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III



Sumber : Edward III (1980 : 21)

Menurut Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi, hal ini berkaitan dengan tindakan yang akan diambil pelaksana serta maksud dan tujuan kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, sehingga dapat meminimalisir risiko kegagalan dalam implementasi kebijakan.
2. Sumber daya, berkaitan dengan sesuatu hal yang mendukung keberhasilan implementasi, bukan hanya sumber daya manusia tetapi juga finansial. Sumber daya yang terbatas tentu menghambat keberhasilan pelaksana untuk menjalankan kebijakan.
3. Disposisi adalah kepribadian dan sifat pelaksana. Apabila pelaksana mempunyai karakter yang baik, maka kebijakan akan terlaksana sesuai dengan tujuan awal. Oleh sebab itu, pentingnya ketepatan dalam penempatan pelaksana, memperhatikan dan memfokuskan motivasi mereka.
4. Struktur birokrasi merupakan sistem komponen kerja (satuan) pada suatu organisasi yang menunjukkan alokasi kerja yang jelas serta bagaimana beragam peran atau kegiatan yang ada terintegrasi. Susunan organisasi yang terlalu gemuk cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan mekanisme birokrasi menjadi berbelit sehingga kegiatan organisasi kurang fleksibel. Dimensi susunan organisasi berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi dalam dunia kerja.

Literasi Digital

Literasi digital merupakan kecakapan untuk menerapkan teknologi dan informasi melalui peranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai situasi akademik, profesional, dan kehidupan (Glister, 1997). Literasi digital mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan digital. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat digital, memahami informasi yang ditemui di dunia maya, dan berpartisipasi dengan bijak dalam berbagai platform digital. Literasi digital mencakup kemampuan untuk berpikir secara kritis terhadap informasi digital yang diterima, mengidentifikasi bias, serta menganalisis dan menyintesis informasi secara efektif.

Berdasarkan beberapa definisi dan karakteristik literasi digital yang telah dipaparkan oleh para ahli, diperoleh kesimpulan bahwa literasi digital merupakan kecakapan memperoleh informasi digital serta keterampilan dalam mengoperasikan perangkat digital. Diluar dari kemampuan pengoperasian perangkat digital, juga diharapkan mampu untuk memilah informasi, berpikir secara kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara efektif, tetapi tetap memperhatikan keamanan dan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Literasi digital menjadi semakin penting dalam masyarakat modern yang semakin terhubung secara digital. Kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi dan mengelola informasi digital menjadi keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai konteks kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dan merangkum berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang diperoleh melalui hasil pengamatan maupun wawancara terkait masalah yang diteliti dengan kondisi faktual di lapangan. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan implementasi gerakan literasi digital berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; program yang menunjang kebijakan gerakan literasi digital; serta faktor yang mendukung dan menghambat sesuai dengan deskripsi fakta yang ada di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), penerapan literasi digital di lingkungan sekolah dilakukan dengan cara menggabungkannya ke dalam kurikulum yang sudah ada. Pelaksanaannya dapat terjadi baik di dalam maupun di luar kelas, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua. Pengembangan literasi digital bertujuan untuk menunjukkan praktik digital sebagai suatu program dan budaya di sekolah. Literasi digital juga dapat diintegrasikan selama proses pembelajaran di sekolah, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua kegiatan siswa dan guru di dalam maupun di luar kelas. Para guru dan pendidik memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh yang baik dalam implementasinya. Pada tingkat yang lebih luas, upaya literasi digital membutuhkan partisipasi dari masyarakat, seperti para penggiat literasi digital, orang tua, dan tenaga ahli.

Dengan mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum pendidikan, lembaga pendidikan dapat mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tuntutan dunia yang semakin terhubung secara digital. Beberapa alasan yang menjadikan literasi digital memainkan peran kunci dalam konteks pendidikan, yaitu :

1. Persiapan untuk dunia digital, yang mana sekolah perlu membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.
2. Akses ke informasi, memungkinkan siswa untuk menavigasi melalui berbagai sumber informasi digital dengan bijak sekaligus belajar bagaimana menyaring, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan kritis.
3. Kemampuan pemecahan masalah, cara menggunakan alat digital untuk menyelesaikan masalah, baik dalam konteks akademis maupun kehidupan sehari-hari.
4. Komunikasi dan kolaborasi, berpartisipasi dalam proyek bersama secara *online*, berbagi ide, dan bekerja sama dengan orang lain di seluruh dunia.
5. Keamanan digital, mencakup pemahaman tentang keamanan *online* mengenai privasi, perlindungan data, dan menggunakan teknologi secara aman.
6. Kreativitas dan inovasi, membuat konten digital, mengembangkan proyek inovatif, dan mengekspresikan ide-ide melalui berbagai platform digital.
7. Penyederhanaan pembelajaran, teknologi digital dapat membantu menyederhanakan proses pembelajaran menjadi pembelajaran *online*, sumber daya digital, dan aplikasi edukatif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah diakses.

SMK Assalam merupakan salah satu sekolah unggul yang menerapkan literasi digital dalam lingkungan sekolah. Kebijakan literasi digital diimplementasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadahi, seperti adanya proyektor, wifi, hingga ruang praktik siswa. Dalam

proses belajar mengajar juga beberapa dilakukan menggunakan media digital seperti pemanfaatan *Google Form*, *Google Classroom*, dan *Quiziz*. Selain itu, SMK Assalam juga menjalin kolaborasi dengan Galeri Kreatif yang merupakan mitra Ruang Belajar Aqil dalam bidang literasi, salah satunya literasi digital. Relawan magang di Ruang Belajar Aqil berkesempatan untuk menjadi fasilitator materi terkait dengan literasi digital, seperti mengoperasikan *Microsoft Office*, *Zoom Meetings*, hingga *Editing Video*. Tidak hanya penyampaian materi tetapi juga peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba untuk mengoperasikan langsung melalui perangkat elektronik yang disediakan.

Gambar 2. Kegiatan literasi digital di SMK Assalam



Sumber : Dokumentasi Penulis

Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Digital di SMK Assalam berdasarkan teori George C. Edward III (1980), yakni :

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi unsur penting sebab kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar memahami tindakan yang perlu disiapkan dan dilakukan untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut sehingga mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Keterampilan komunikasi membantu memastikan bahwa semua pihak terinformasi dengan baik dan bahwa informasi dapat disampaikan dengan jelas. Komunikasi antar pelaksana kebijakan di SMK Assalam sejauh ini sudah cukup baik dan jelas. Pelaksana berkomunikasi dengan rutin melalui rapat koordinasi atau melalui *Whatsapp Group* mengenai program literasi digital yang dijalankan setiap harinya. Komunikasi ini memudahkan guru mata pelajaran atau wali kelas memahami penerapan literasi digital yang ada dalam pembelajaran. Komunikasi kepada sasaran kebijakan juga sudah berjalan dengan baik melalui *Whatsapp Group* bersama siswa maupun wali murid untuk mendukung keberhasilan program. Sasaran kebijakan sudah jelas ditujukan kepada siswa melalui media pembelajaran dengan menggunakan *google form*, *google classroom*, ataupun *quiziz*. Kejelasan informasi yang ada memudahkan proses komunikasi antar pelaksana kepada sasaran kebijakan, sehingga implementasi literasi digital dapat berjalan dengan optimal.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya menjadi penentu, sebab melalui sumber daya manusia yang berkualitas akan terselenggara pula kebijakan publik yang baik. Sumber daya manusia dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dengan memastikan bahwa organisasi memiliki

sumber daya manusia yang berkualitas, terlatih, dan terfokus pada tujuan yang diinginkan. Seringkali faktor penghambat utama implementasi kebijakan disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya (Leo Agustino, 2016 : 138). Dewan guru dan staff sebagai pelaksana kebijakan di SMK Assalam sangat terbuka dan kompeten di bidangnya sehingga dalam menjalankan pekerjaannya dapat optimal. SMK Assalam menginisiasi adanya program Desa Wifi agar akses informasi lebih merata baik hingga di luar sekolah. Lingkungan sekolah dilengkapi dengan fasilitas atau sarana prasaranya yang memadai seperti proyektor, wifi, *speaker*, hingga laboratorium komputer untuk ruang praktik siswa. Kelengkapan sarana dan prasarana ini memudahkan literasi digital kepada peserta didik di lingkungan sekolah.

3. Disposisi

Disposisi dimaksudkan sebagai kemauan atau keinginan pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh. Agar implementasi kebijakan dapat efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui yang dilakukan tetapi juga mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga bisa terjadi (Leo Agustino, 2016 : 139). Kemampuan untuk menggabungkan keterampilan teknis dengan sikap yang positif dan adaptif dapat membantu implementasi kebijakan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Para pelaksana kebijakan di SMK Assalam sendiri merespon dengan baik perubahan pendidika menuju digitalisasi dengan mendukung program literasi digital yang ada. Hal ini terlihat selama proses pelaksanaan, dimana dewan guru selalu berusaha untuk memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengakses sistem informasi dan jaringan internet yang baik di lingkungan sekolah. Dewan guru sebagai pelaksana juga bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepada mereka, berkontribusi aktif untuk mendukung keberhasilan penerapan literasi digital dalam mata pelajaran yang disampaikan. Selain itu, dewan guru juga terbuka terhadap kolaborasi dari pihak luar untuk turut meningkatkan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kecakapan literasi digital di era modern. Keterbukaan ini memberikan inovasi dalam proses ajar, sehingga peserta didik dapat menerima informasi baru yang beragam.

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Leo Agustino (2016 : 140) menyampaikan bahwa meskipun terdapat sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, dan pihak yang menerapkannya tahu tindakan yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mempunyai kemauan untuk melakukannya, implementasi kebijakan mungkin masih belum efektif karena adanya inefisiensi dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai tingkat hierarki dan unit organisasi, dengan peran dan tanggung jawab tertentu saat pelaksanaan kebijakan. Struktur tim literasi digital di SMK Assalam belum tersusun secara hierarkis, hanya tim literasi secara umum yang terdiri dari kepala perpustakaan, staff, petugas laboratorium komputer, anggota osis, hingga perwakilan dalam setiap kelas. Selain itu, belum ada penanggung jawab program serta pembagian tugas yang jelas untuk tim pelaksana literasi digital di lingkungan sekolah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Digital di SMK Assalam.

1. Faktor Pendukung

Dalam keberhasilannya mengimplementasikan literasi digital, SMK Assalam di dukung oleh komunikasi yang efektif dari pelaksana kepada sasaran kebijakan. Informasi yang disampaikan dengan jelas dan tepat waktu membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena para pelaksana dapat bekerja dengan

pemahaman yang sama. Keberhasilan pelaksana untuk mengkomunikasikan program literasi digital kepada sasaran meminimalisir kegagalan dalam pelaksanaannya. Selain itu, sumber daya yang memadai berkaitan dengan sikap pelaksana yang terbuka dan mendukung hingga sarana prasarana yang dimiliki oleh SMK Assalam dalam mewujudkan lingkungan sekolah berbasis digital.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambatnya disebabkan belum adanya tim literasi digital yang terusun secara hierarkis dengan pembagian kerja yang jelas. Struktur birokrasi yang jelas membantu dalam menghindari kesalahan dan duplikasi tugas dengan menetapkan prosedur yang jelas. Selain itu, juga berfungsi untuk menetapkan garis komando yang jelas dari tingkat manajemen tertinggi hingga tingkat operasional. Tanpa struktur ini, proses pengambilan keputusan dan komunikasi internal bisa menjadi kacau dan tidak efisien. Kemudian berkaitan dengan belum meratanya akses internet di Desa Rejoyoso yang menyebabkan kurangnya kesadaran peserta didik mengenai pentingnya kecakapan literasi digital. Selain itu, rendahnya dukungan dan kontrol dari orang tua karena tidak semua orang tua terbiasa dalam program pendidikan dan perkembangan dunia digital.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi gerakan literasi digital di SMK Assalam sejauh ini sudah cukup baik. Adapun dalam implementasi kebijakan gerakan literasi digital di SMK Assalam berdasarkan teori George C. Edward III (1980), dipengaruhi beberapa aspek yaitu komunikasi yang dilakukan secara jelas dan efisien melalui rapat koordinasi langsung maupun via *WhatsApp Group*. Sumber daya, berkaitan dengan dewan guru yang mendukung dan sarana prasarana di SMK Assalam yang cukup memadai. Disposisi, berkaitan dengan sikap pelaksana yang terbuka dan menerima perubahan sehingga proses implementasi lebih mudah. Struktur birokrasi, tim literasi digital belum tersusun secara hierarkis dan formal.

Dalam implementasinya tentu masih ditemui beberapa faktor penghambat dan pendukung. Faktor pendukung berasal dari komunikasi efektif dari pelaksana kepada sasaran, sumber daya manusia yang terbuka akan perubahan hingga fasilitas memadai di lingkungan sekolah. Sedangkan faktor yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi berasal dari struktur birokrasi tim literasi digital yang belum jelas dan pembagian kerja yang kurang sistematis. Dalam mengatasi hal ini, sekolah perlu menyusun tim literasi digital secara hierarkis dengan pembagian kerja yang jelas disertai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar para pelaksana memiliki pandangan yang sama. Selain itu, tanpa struktur birokrasi, pembagian tugas dan tanggung jawab mungkin tidak jelas. Anggota organisasi mungkin tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut dan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi).
- Antonius Havik, I. & Y. D. H. (2022). Analisis Hukum Terhadap Instrumen Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Akselerasi Literasi Digital. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Galuh*, 13(1), 104–116.
- Desi, Y. P. (2020). Gerakan Literasi Digital Berbasis Sekolah: Implementasi dan Strategi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 51. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i1.3510>
- Naufal, H. A. (2021). Literasi Digital. *Perspektif*, 1(2), 195–202. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. *Studi Administrasi Publik*, 117–126.
- Putri, F. J., & Hermawan, H. D. (2023). Buletin literasi budaya sekolah. *Buletin Literasi Budaya Sekolah*, 5(2), 4. <https://doi.org/10.23917/blbs.v5i1.22704>
- Putri, I. I. M., Rmiyanti, R., & Ningsih, E. R. (2020). Realisasi Gerakan Literasi Digital Sebagai Implementasi Gerakan Literasi Nasional Di Sekolah Muhammadiyah Pangkalan Bun. *Buletin Literasi Budaya Sekolah*, 2(2), 87–99. <https://doi.org/10.23917/blbs.v2i2.12836>
- Safitri, I., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis Kebijakan terkait Kebijakan Literasi Digital di Sekolah Dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 176–180. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.123>
- Setyaningrum, A. (2022). Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Digital Di Smp Negeri 1 Mungkid Kabupaten Magelang. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(4), 1–13.
- Suriani, A. I. (2022). Kebijakan Literasi Digital Bagi Pengembangan Karakter Peserta Didik. *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)*, 7(1), 54–64. <https://doi.org/10.26618/jkpd.v7i1.7030>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>